

TATA KELOLA KOLABORATIF PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI KODIM 0733 KOTA SEMARANG

Dwi Indriastuti

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
dwi.indriastuti21@ui.ac.id

Mia Priluddina

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
mia.priluddina21@ui.ac.id

Ryan Budi Rusmana

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
ryan.budi@ui.ac.id

Toni Yuliyanto

Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
toni.yuliyanto@ui.ac.id

Abstrak

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia saat ini adalah ketahanan pangan. Hal ini sangat relevan dengan kapasitas suatu negara atau daerah dalam rangka menjamin bahwa warganya memiliki akses yang cukup terhadap makanan yang sehat. Ketahanan pangan juga menjadi semakin penting untuk dibahas sejalan dengan meningkatnya biaya pangan dan energi serta krisis pangan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Bahkan beberapa negara telah memberlakukan pembatasan ekspor makanan untuk melindungi pasokan pangan dalam negeri. Ketahanan pangan dan air telah dibahas dalam agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs). Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyepakati rencana aksi global tersebut, yang bertujuan untuk melindungi lingkungan, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketidaksetaraan. Salah satu faktor terpenting yang tertuang dalam tujuan SDGs sendiri adalah ketahanan pangan. Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mengembangkan strategi untuk mencapai ketahanan pangan ini. Tata kelola yang jelas juga harus dibuat untuk kolaborasi ini, termasuk siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana prosedurnya. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan ini, TNI Angkatan Darat melakukan inisiatif untuk ikut berperan dengan melibatkan kelompok petani dan pemerintah daerah. Dalam mencapai ketahanan pangan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan yang terlibat juga harus didasari kepercayaan (trust) karena keberhasilan membutuhkan kesepemahaman dan dedikasi untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi dalam manajemen ketahanan pangan juga dipengaruhi oleh elemen-elemen seperti pengetahuan umum, aksesibilitas sumber daya, dan pembagian tanggung jawab. Keberhasilan kolaborasi sering diukur melalui hasil sementara yang telah dicapai. Dalam konteks ketahanan pangan, ini dapat diartikan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas, diversifikasi pangan dan peningkatan produksi pangan. Ketahanan pangan merupakan topik yang kompleks dan membutuhkan koordinasi dari berbagai pemangku kepentingan. Pencapaian tujuan ketahanan pangan bergantung pada kerja sama yang efektif, yang didukung oleh tata kelola yang transparan, kepercayaan, dan dedikasi.

Kata Kunci: Ketahanan pangan, Ketahanan air, Kenaikan harga pangan, Sustainable Development Goals (SDGs), Kedaulatan negara, Collaborative Governance

Abstract

One of the main problems faced by many countries around the world today is food security. This is very relevant to the capacity of a country or region to ensure that its citizens have sufficient access to healthy food. Food security is also becoming increasingly important to discuss in line with increasing food and energy costs and the food crisis caused by climate change. Some countries have even imposed food export restrictions to protect domestic food supplies. Food and water security have been discussed in global agendas such as the Sustainable Development Goals (SDGs). United Nations (UN) member countries have agreed on the global action plan, which aims to protect the environment, eradicate poverty and reduce inequality. One of the most important factors contained in the SDGs goals is food security. Government, society and stakeholders must work together to develop strategies to achieve food security. Clear governance must also be created for this collaboration, including who is responsible and what the procedures are. In an effort to increase food security, the Indonesian Army has taken the initiative to play a role by involving farmer groups and local governments. In achieving food security, collaboration between the stakeholders involved must also be based on trust because success requires understanding and dedication to achieve common goals. Collaboration in food security management is also influenced by elements such as common knowledge, accessibility of resources, and division of responsibilities. The success of collaboration is often measured by the interim results that have been achieved. In the context of food security, this can mean increasing people's access to quality food, food diversification and increasing food production. Food security is a complex topic and requires coordination from various stakeholders. Achieving food security goals depends on effective cooperation, supported by transparent governance, trust and dedication.

Keywords: Food security, Water security, Increase in food prices, Sustainable Development Goals (SDGs), State sovereignty, Collaborative Governance

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan dan air telah menjadi isu prioritas dalam agenda global menyusul kenaikan harga pangan dan energi yang dimulai pada tahun 2007.¹ Kenaikan tersebut dipicu adanya krisis pangan dimana beberapa negara menerapkan pembatasan ekspor untuk melindungi pasokan pangan bagi masyarakat mereka sendiri sebagai implikasi perubahan iklim, hal ini mengakibatkan negara-negara yang bergantung pada impor pangan harus menyusun kebijakan serta strategi untuk menciptakan ketahanan pangan domestik. Strategisnya isu tersebut ditandai dengan masuknya ketahanan pangan dalam agenda global 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Kesepakatan tersebut diterjemahkan sebagai salah satu panduan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Indonesia dan kemudian diselaraskan dengan perencanaan program di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) oleh pemerintah.

Mujiburrohman dalam penelitiannya menjelaskan peran penting pangan yakni sebagai landasan kehidupan masyarakat yang menunjang bidang lainnya seperti pertumbuhan ekonomi,

¹ U. Lele, M. Klousia-Marquis, dan S. Goswami, "Good Governance for Food, Water and Energy Security," *Aquatic Procedia* 1 (2013): 44–63, <https://doi.org/10.1016/j.aqpro.2013.07.005>.

kualitas kesehatan, tingkat produktifitas dan mempengaruhi pembentukan karakter masyarakat.² Lebih luas ketahanan pangan nasional suatu negara sangat erat berkaitan dengan upaya negara untuk mempertahankan kedaulatan dan kelangsungan hidup negara tersebut. Ketahanan pangan nasional merupakan gambaran kemampuan suatu negara untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses terhadap pangan dengan kualitas dan keamanan yang sesuai, berdasarkan optimalisasi pemanfaatan pangan dan keanekaragaman sumber daya lokal.

Pangan menjadi salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan di Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2021 Indonesia masih melakukan impor beras sebesar 407.741 ton dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 429.207 ton untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Tantangan dalam mencapai ketahanan pangan di tingkat nasional antara lain disebabkan konversi lahan pertanian, degradasi kualitas lahan serta fragmentasi kelembagaan. Setiap tahun luas lahan pertanian sawah (sawah irigasi dan non irigasi) yang memproduksi sumber pangan beras di Indonesia semakin menurun, dari luas 8.092.907 Ha pada tahun 2015 menjadi 7.463.948 Ha pada tahun 2019 atau turun 8,4% (BPS, 2019). Lahan pertanian yang semakin sempit menyebabkan produksi pangan juga menurun. Iqbal dan Sumaryanto pada penelitiannya menjelaskan bahwa karena kebutuhan perluasan lahan untuk pengembangan area komersial maupun proyek infrastruktur sehingga menyebabkan kenaikan harga tanah yang kemudian mendorong petani di sekitar untuk menjual tanah pertanian mereka. Akibatnya terjadi konversi lahan dalam skala besar yang sulit dihentikan.

Ketahanan pangan dapat dicapai melalui strategi kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan komponen lain secara proporsional. Kolaborasi negara-masyarakat sangat penting untuk keberlanjutan ketahanan pangan.³ Salah satu pemangku kepentingan yang turut berperan dalam mewujudkan kedaulatan negara melalui pilar ketahanan pangan di Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 TNI AD terlibat dalam Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pada Bagian Ketiga, Pasal 7 yaitu tugas pokok TNI dilakukan salah satunya dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai sistem pertahanan semesta. Dalam OMSP, untuk menjaga pertahanan nasional di bidang pembangunan, TNI AD diamanatkan untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi pembinaan territorial dengan memberdayakan potensi wilayah dan memantapkan kemandirian TNI dengan rakyat.

Program pembinaan ketahanan pangan TNI AD tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) TNI AD tahun 2020-2024 untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional di wilayah.

² M. A. Mujiburrohman, "Civil Society-Militer dalam Mencapai Ketahanan Pangan di Jawa Timur Civil Society-Military In Achieve Food Security In East Java" 12, no. 2 (2021).

³ Mujiburrohman.

Selain itu, untuk meningkatkan swasembada pangan dan pembinaan pembekalan keterampilan pertanian dilaksanakan melalui pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) guna meningkatkan produktivitas sumber daya yang tersedia. Program tersebut dijalankan secara berjenjang, dari level Markas Besar AD (Mabesad) hingga tingkat Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim). Pelaksanaan kegiatan berupa penyusunan dokumen rencana kegiatan, buku panduan sampai dengan piloting kegiatan menanam tanaman hortikultura dan kolam ikan air tawar. TNI AD berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan kelompok tani (poktan). Lokus penelitian ini adalah Kodim 0733/Kota Semarang dilatarbelakangi adanya prioritas lokal seperti lahan tidur yang masih bisa diubah menjadi lahan produktif dan meningkatkan kapasitas pengetahuan poktan dalam mengolah lahan tidur.

Dalam proses kolaborasi diperlukan tindakan-tindakan antar pihak untuk mencapai kesepakatan bersama atas tujuan yang ditetapkan. Ansell & Gash mendefinisikan tata kelola kolaborasi sebagai pengaturan mengenai proses pengambilan keputusan kolektif formal yang berorientasi pada consensus untuk membuat dan menerapkan kebijakan public, mengelola program atas asset public yang melibatkan pemangku kepentingan diluar lembaga public. Faktor-faktor penting dalam proses kolaborasi oleh Ansell & Gash, antara lain adanya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, pengembangan komitmen dan pemahaman bersama sehingga menghasilkan sebuah hasil dan dampak.⁴

Tata kelola kolaborasi yang lebih luas dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, & Balogh, dimana kolaborasi tidak terbatas pada tata kelola formal namun mencakup tata kelola multi mitra dengan melibatkan kemitraan antar negara, sector swasta, masyarakat sipil termasuk pengaturan kemitraan public dengan swasta, swasta dengan social dan pengelolaan bersama. Tata kelola kolaborasi dalam konteks sistem dijalankan melalui kerangka kerja Collaborative Governance Regime (CGR) dimana didalamnya terdapat collaboration dynamics yang merupakan kerangka kerja dalam menghasilkan kebijakan. Faktor pendorong collaboration dynamics meliputi engagement principles, shared motivation, dan capacity for joint action.⁵

Fatika Sari dalam penelitiannya mengenai tata kelola kolaboratif ketahanan pangan di Kota Cilegon menggunakan pendekatan teori kolaborasi Ansell & Gash untuk menganalisis implementasi proses kolaborasi yang terjadi antara Dinas Pertanian Kota Cilegon, pihak swasta PT Pertamina, PT MCCI dan masyarakat sipil Kelompok Wanita Tani (KWT). Hasil penelitian

⁴ Chris Ansell dan Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (1 Oktober 2008): 543–71, <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.

⁵ Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh, "An Integrative Framework for Collaborative Governance," *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (1 Januari 2012): 1–29, <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.

menunjukkan bahwa proses tata kelola kolaboratif belum merata pada program, sebagai contoh pada proses pengembangan komitmen, terdapat kurangnya pemeliharaan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi anggota KWT. Pada proses intermediated outcome ditemukan masih terdapat program KWT yang tidak bersifat jangka panjang dalam menjalin Kerjasama dengan lembaga kolaborasi sehingga program hanya berjalan pada awal dan belum ada produk inovatif dari hasil panen KWT.

Konsep tata kelola kolaboratif Ansell&Gash juga digunakan dalam penelitian Larsson dkk, di Swedia mengenai pengelolaan ketahanan pangan antara perusahaan pangan dan otoritas public Swedia.⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya ketahanan pangan telah muncul, namun pengaturan tata kelola kolaboratif berisiko hanya menciptakan ilusi kesiapan, karena mandat dan kepemimpinan yang tidak jelas. Kepemimpinan tidak mampu memajukan kepercayaan antar pihak dan komitmen yang nyata untuk menjamin ketahanan pangan nasional.

Dalam mengukur keberhasilan proses kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, menurut DeSeve terdapat sepuluh indikator yakni:

1. Struktur jaringan

Dalam tata kelola kolaboratif jaringan yang dibentuk tidak boleh bersifat hierarkis, bahwa kedudukan yang lebih tinggi kekuasaannya menekan ke bawah. Jaringan kolaboratif yang terbentuk harus diorganisasikan melalui struktur yang terlibat, tidak ada dominasi dan monopoli kekuasaan. Masing-masing pihak mempunyai persamaan hak, tanggung jawab, kewajiban dan akses peluang dalam mencapai tujuan bersama.

2. Komitmen terhadap tujuan bersama

Kolaborasi tidak boleh hanya menguntungkan beberapa pihak saja, namun semua pihak termasuk masyarakat harus mendapatkan manfaat atau dampak positif dari adanya Kerjasama tersebut.

3. Kepercayaan antar pihak

Setiap pemangku kepentingan harus saling percaya sebagai bentuk hubungan profesional yang terjalin untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kolaborasi.

4. Tata kelola

Hubungan saling percaya antara actor pemerintahan merupakan hal yang penting. Selain beberapa aturan disepakati bersama oleh masing-masing pemangku kepentingan dan terdapat musyawarah untuk menentukan bagaimana kolaborasi dilakukan.

⁶ Oscar L. Larsson dan Sara Sjöqvist, "Managing National Food Security in the Global North: Is Collaborative Governance a Possible Route Forward?," *Risk, Hazards & Crisis in Public Policy* 13, no. 2 (Juni 2022): 118–43, <https://doi.org/10.1002/rhc3.12231>.

5. Akses terhadap otoritas

Dalam akses terhadap otoritas sudah terdapat aturan kewenangan yang dijelas diterima oleh setiap pemangku kepentingan untuk menjalankan perannya sesuai kewenangannya dan dapat diterima secara luas sesuai dengan ketentuan prosedur yang jelas.

6. Kepemimpinan

Individu atau kelompok bersedia menjadi pemimpin bagi tata kelola kolaborasi untuk memandu pekerjaannya menuju hasil yang disepakati.

7. Akuntabilitas Distributif/Tanggung jawab

Berbagi tata kelola dalam pengambilan keputusan antar anggota kolaborasi sehingga semua pihak bertanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan.

8. Berbagi Informasi

Akses informasi yang mudah bagi anggota kolaborasi, terdapat perlindungan privasi, dan pembatasan akses bagi non-anggota jika diperlukan.

9. Akses terhadap sumberdaya

Ketersediaan finansial, teknis, manusia, dan lainnya sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan Public Value Network (PVN).

10. Manajemen jaringan

Untuk menjalankan jaringan dengan baik, pengelolaan jaringan harus memiliki mekanisme untuk penyelesaian sengketa internal, alokasi sumber daya, kontrol kualitas, pemeliharaan organisasi, dan masalah administrasi lainnya yang disepakati.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas mengenai: 1) bagaimana proses kolaborasi yang terjadi antara TNI AD dengan masyarakat petani dapat terjadi?; 2) faktor penghambat dan pendukung apa saja yang mempengaruhi proses kolaborasi dalam pengelolaan ketahanan pangan antara TNI dan masyarakat petani?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan model tata kelola kolaboratif dalam kasus kolaborasi ketahanan pangan antara TNI AD dengan masyarakat di Kodim 0733 Kota Semarang. Nassaji berpendapat bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena dan ciri-cirinya.⁷ Teknik pengumpulan data dengan tinjauan Pustaka. Data-data yang dianalisis berupa data sekunder berupa hasil wawancara, jurnal bereputasi, laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Teknis analisis

⁷ Hossein Nassaji, "Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis," *Language Teaching Research* 19, no. 2 (Maret 2015): 129–32, <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>.

meliputi tiga tahapan, yaitu data condensation (memilih dan menyederhanakan data), data display (menyusun data secara sistematis), dan drawing and verifying conclusions (menarik kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative Governance di pengaruhi oleh faktor situasi, kondisi, dan pelaku yang terlibat dalam proses tersebut. Menurut Ansel & Gash,⁸ Forum Collaborative Governance di inisiasi oleh Pemerintah, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Jolejole dkk., Forum Collaborative Governance diinisiasi oleh Private Sector.⁹ Sehingga dalam penerapan Collaborative Governance bisa sangat bervariasi dan kata kunci yang bisa di ambil adalah kolaborasi antara pemerintah dengan non pemerintah untuk mengelola urusan public.¹⁰

Model Collaborative Governance digunakan sebagai alat untuk menganalisis kolaborasi/kerjasama antara Kodim 0733 Kota Semarang dengan Dinas Pertanian Kota Semarang dan kelompok tani.¹¹ Model ini memiliki variable atau elemen yang membentuk hubungan satu sama lain. Dalam model ini terdapat 5 variabel utama yang bertujuan untuk mencapai konsensus bersama. Variable-variabel tersebut adalah Face To Face (Dialog Tatap Muka), Trust Building (Membangun Kepercayaan), Commitment To Process (Komitmen Terhadap Proses), Shared Understanding (Pemahaman Bersama), Intermediate Outcomes (Hasil Antara).¹² Kolaborasi antara Kodim 0733 Kota Semarang dengan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) merupakan salah satu strategi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Kota Semarang.¹³ Collaborative governance yang efektif harus menyediakan mekanisme baru untuk tindakan kolaboratif yang ditentukan oleh mitra kolaborasi sejalan dengan teori tindakan tersurat dan tersirat mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁴

Dimensi tata kelola kolaboratif sebagai prasyarat keberhasilan kolaborasi sesuai dengan model Collaborative Governance terdiri dari 4 (empat) variabel utama yang terdiri dari: kondisi

⁸ Ansell dan Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice."

⁹ Christina B. Jolejole dkk., "Profitability and Environmental Stewardship for Row Crop Production: Are There Trade-Offs?," *2009 Conference, August 16-22, 2009, Beijing, China, 2009 Conference*, August 16-22, 2009, Beijing, China, 2009, <https://ideas.repec.org/p/ags/iaae09/50920.html>.

¹⁰ Giat Tri Sambodo dan Ulung Pribadi, "Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta," *Journal of Governance and Public Policy* 3, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0052>.

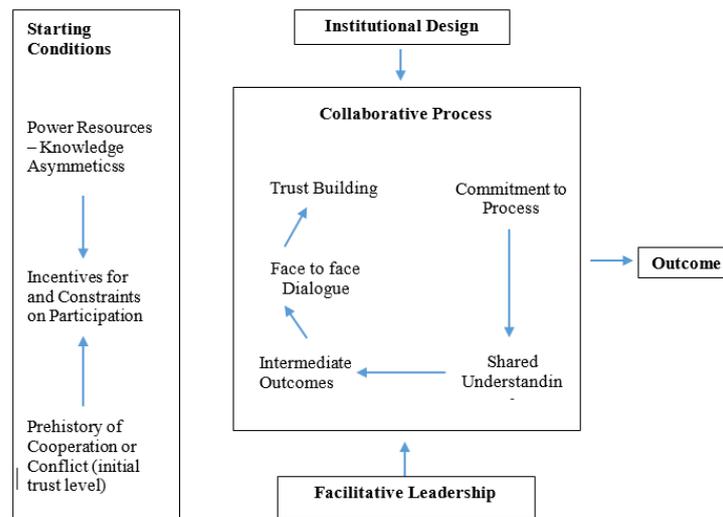
¹¹ Ansell dan Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice."

¹² Arini Permatasari, "Collaborative Governance BUMD Desa Margaasih Kabupaten Bandung," *REFORMASI* 13, no. 1 (7 Februari 2023): 25–33, <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4370>.

¹³ K. IV/Dip, "Pangdam IV/Diponegoro Gandeng Forkopimda Jateng Dukung Ketahanan Pangan Nasional," 2022, <https://kodam4.mil.id/pangdam-iv-diponegoro-gandeng-forkopimda-jateng-dukung-ketahanan-pangan-nasional/>.

¹⁴ William D. Coleman, Grace D. Skogstad, dan Michael M. Atkinson, "Paradigm Shifts and Policy Networks: Cumulative Change in Agriculture," *Journal of Public Policy* 16, no. 3 (1996): 273–301.

awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1 Model Collaborative Governance.¹⁵



Gambar 1. Model Collaborative Governance Ansell and Gash

Sumber : Ansell & Gash, 2008

Dari definisi Ansell & Gash di atas, bila diuraikan terdapat 5 hal penting, yaitu:

1. Membentuk forum yang diinisiasi oleh pemerintah/Lembaga.
2. Partisipan terdiri dari pemerintah dan non pemerintah.
3. Partisipan terlibat langsung dan aktif dalam pengambilan kebijakan.
4. Forum yang dibentuk bersifat formal, pertemuan rutin yang terjadwal dan kolektif.
5. Pembentukan forum bertujuan untuk mencapai konsensus kolaborasi yang dibentuk berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik.

Proses Collaborative Governance

a. Face to Face Dialog

Merupakan upaya untuk membangun hubungan interpersonal dan komunikasi langsung antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau tindakan kolaboratif. Proses ini merupakan aspek penting dari collaborative governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi non-profit, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan masalah yang kompleks.¹⁶

¹⁵ Ansell dan Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice."

¹⁶ Janet Bavelas, Jennifer Gerwing, dan Sara Healing, "Doing Mutual Understanding. Calibrating with Micro-Sequences in Face-to-Face Dialogue," *Journal of Pragmatics* 121 (November 2017): 91–112, <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.09.006>.

Dalam penelitian ini, Kodim 0733 Kota Semarang melaksanakan diskusi tatap muka dengan Dinas Pertanian Kota Semarang dan Kelompok Tani. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai kebutuhan dan harapan masing-masing pihak serta sinergisitas dalam rangka mencapai komitmen bersama.

b. Trust Building

Menurut penelitian Tri Sambodo & Pribadi, proses membangun kepercayaan diartikan adanya niatan yang sama untuk mengambil kebijakan yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat.¹⁷ Pada proses Trust Building dimulai dengan membangun komunikasi antar aktor, hubungan antar lembaga kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah yang baik sangat mendukung upaya saling membangun kepercayaan.¹⁸ Kodim 0733 Kota Semarang juga membangun kepercayaan dengan Dinas Pertanian dan kelompok tani melalui pelaksanaan tugas dan fungsi utama TNI AD untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah. Hal ini menjadi salah satu kunci untuk membina kepercayaan dan menjadi dasar bagi kolaborasi yang berkelanjutan serta memberikan hasil positif dalam upaya menjaga ketahanan pangan di suatu wilayah.¹⁹

c. Commitment to Process

Commitment to Process merupakan kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses tertentu guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Saling berbagi komitmen, berarti mereka saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi permasalahan dan solusi, bahwa proses kolaborasi ini merupakan milik bersama, dan saling terbuka untuk mendapatkan manfaat bersama.²⁰ Adanya komitmen bersama antara Kodim 0733 Kota Semarang, Dinas Pertanian, dan kelompok tani menjadi pondasi penting dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Para aktor sepakat untuk bekerja sama dalam mengembangkan potensi lahan tidur milik Kodim 0733 Kota Semarang menjadi lahan produktif. TNI AD memberikan kesempatan kepada petani setempat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan lahan. Partisipasi petani setempat merupakan bentuk komitmen mereka terhadap kolaborasi ketahanan pangan.²¹

¹⁷ Tri Sambodo dan Pribadi, "Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta."

¹⁸ Bing Ran dan Huiting Qi, "The Entangled Twins: Power and Trust in Collaborative Governance," *Administration & Society* 51, no. 4 (1 April 2019): 607–36, <https://doi.org/10.1177/0095399718801000>.

¹⁹ Abdul Azis, Cucu Sugiarti, dan Rachmat Ramdani, "Collaborative Governance dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian," *JURNAL MANAJEMEN* 13, no. 4 (19 Desember 2021): 647–53, <https://doi.org/10.30872/jmmn.v13i4.9948>.

²⁰ Rofi' Ramadhona Iyoega, Endang Wirjatmi Trilestari, dan Cintantya Andhita Dara Kirana, "Collaborative Governance Dalam Pembangunan Sektor Pertanian Di Kabupaten Bandung," *PERSPEKTIF* 9, no. 1 (1 Januari 2020): 55–65, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2864>.

²¹ K. IV/Dip, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Ketahanan Pangan di Wilayah Kodam IV/Diponegoro Ta 2023," 2023.

d. Shared Understanding

Dalam sebuah kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak dengan berbagai kepentingan, di mana rasa curiga bisa saja menjadi permasalahan, maka berbagai pemahaman yang sama menjadi faktor lain yang sangat penting. Kolaborasi hanya bisa terjadi apabila para pihak telah memiliki satu visi, tujuan, dan pandangan orientasi yang sama. Setiap pihak dituntut memiliki pemahaman yang sama mengenai program ketahanan pangan yang akan dilakukan.²² Dengan adanya pemahaman bersama, maka resiko kesalahpahaman dapat diminimalkan, meningkatkan efisiensi kerja, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai.

e. Intermediate outcome

Intermediate outcome adalah hasil – hasil sementara atas proses yang sedang berlangsung yang memberi manfaat dan bernilai strategis.²³ Hasil sementara yang mulai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu pembuatan model/demplot tanaman Hortikultura (tanaman jenis sayuran) dengan menggunakan polybag diameter 25 s.d. 30 cm sejumlah minimal 30 buah. Selain itu, hasil sementara lainnya adalah pembuatan Demplot model/pilot project kolam ikan air tawar yang telah dilaksanakan oleh Kodim dibuat dengan ukuran minimal 2 x 3 m² dan pengisian ikan sesuai dengan Tipologi wilayah seperti ikan lele, ikan nila, ikan patin, ikan mas, dan jenis ikan air tawar lainnya.²⁴

Ukuran Keberhasilan Tata Kelola Kolaborasi Dalam Program Ketahanan Pangan Di Kodim 0733 Kota Semarang

Untuk mengetahui secara detail mengenai kolaborasi yang dilakukan oleh TNI AD, Dinas Pertanian, dan kelompok tani, perlu dilakukan analisis terhadap sejumlah faktor yang mempengaruhi keberhasilan collaborative governance:²⁵

a. Network Structure

Model network dapat dilihat dari administratif yang telah diatur diantara TNI AD, Dinas Pertanian, serta kelompok tani yang terlibat. Kedudukan antar pihak yang terlibat adalah sama, tidak ada satu pihak yang berkedudukan lebih tinggi dari pihak lainnya, hanya saja tugas dan fungsi tiap-tiap bagian berbeda.²⁶ Para pihak saling berbagi ide, gagasan dan ilmu tetapi tetap

²² Gilang Ramadhan, “Fintech Dan Collaborative Governance Dalam Pertanian Di Banten,” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 17, no. 1 (26 Juni 2020): 145–60, <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.567>.

²³ Aziza Bila dan Boni Saputra, “Collaborative Governance dalam Pemerintahan” 09 (2019).

²⁴ IV/Dip, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Ketahanan Pangan di Wilayah Kodam IV/Diponegoro Ta 2023.”

²⁵ G. E. Deseve, *Integration and innovation. The Intelligence Community: The Role of a Netcentric Environment, Managed Networks, and Social Networks. In Unlocking the Power of Networks: Keys to High Performance Government*, Eds. S. Goldsmith and DG Kettl, 2009.

²⁶ Ardhia Mafaza dan Kristina Setyowati, “Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata,” *Jurnal Kebijakan Publik* 11, no. 1 (16 April 2020): 7, <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>.

sesuai dengan tugas pokok serta fungsi masing masing sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui. Dinas Pertanian memandatkan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) untuk memberikan penyuluhan kepada para prajurit TNI AD yang ditunjuk yaitu Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang kemudian bertugas untuk memberikan pelatihan kepada para kelompok tani. Dalam hal ini, Babinsa bertindak sebagai motivator dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pertanian bagi kelompok tani untuk mengembangkan sistem tanam dan teknologi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan.

Namun berdasarkan laporan kegiatan Kodim 0733 Kota Semarang, pihak swasta belum dilibatkan dalam kegiatan kolaborasi ini. Dalam kegiatan kolaborasi ketahanan pangan yang telah diujicobakan, agar dapat direplikasi baik oleh masyarakat di wilayah tersebut maupun di wilayah lainnya maka diperlukan keterlibatan pihak eksternal seperti sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat agar dapat mencapai tujuan.

b. Commitment to a common purpose or mission

TNI AD, Dinas Pertanian, dan kelompok tani berkomitmen terhadap program ketahanan pangan dengan saling membantu untuk tercapainya tujuan yang sudah ditentukan. Commitment to a common purpose menjelaskan bahwa di dalam menjalankan collaborative governance, harus ada komitmen antara lembaga melalui visi dan misi bersama. Adanya visi dan misi tersebut kemudian diwujudkan ke dalam program kerja secara struktural maupun non-struktural di lapangan sehingga dapat membantu masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang bergizi.²⁷

c. Trust (Kepercayaan)

Komponen utama untuk mencapai sebuah tujuan adalah adanya kepercayaan antar partisipan yang berfungsi sebagai perekat organisasi dan jaringan. Tugas yang lebih kompleks membutuhkan lebih banyak "kepercayaan" yang diformalkan dalam protokol dan prosedur yang dipahami dan disetujui oleh para peserta.²⁸ Keberhasilan program ketahanan pangan Kodim 0733 Kota Semarang menjadi indikator adanya kepercayaan satu sama lain yang dibangun melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian, Pemda, dan instansi terkait agar pelaksanaan pembinaan ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik.

d. Governance (Kejelasan Tata Kelola)

Dalam indikator Governance, Deseve menjelaskan bahwa dalam melakukan program kolaborasi harus menekankan kepada kejelasan tata kelola program kolaborasi yang akan

²⁷ Alyaa Larasati Hasna dan Awang Darumurti, "Collaborative Governance dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob di Kota Pekalongan," *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 7, no. 1 (28 April 2023): 25–37, <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24210>.

²⁸ Nanang Sulaeman, Ipik Permana, dan Moh Taufik Hidayat, "Collaborative Governance Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kota Cirebon," *Ijd-Demos* 4, no. 1 (7 April 2022), <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.204>.

dilaksanakan, meliputi kejelasan siapa saja anggota dalam pelaksanaan collaborative governance, kejelasan informasi dan kejelasan dalam memberikan pertanggung jawaban.²⁹ Dalam kegiatan pembinaan ketahanan pangan ini, elemen tata kelola dijabarkan dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Ketahanan Pangan Kodim 0733 Kota Semarang. Dalam Rencana Garis Besar dijelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan, komponen anggota beserta tugas dan tanggung jawabnya. Program Ketahanan Pangan dilakukan oleh seluruh Babinsa Kodim 0733 Kota Semarang sebagai pelaksana lapangan. PPL Kecamatan Genuk sebanyak 15 orang sebagai pemberi materi ilmu pertanian, serta kelompok tani sebagai penerima materi tentang pengembangan sistem tanam dan teknologi dalam rangka mendukung program Ketahanan Pangan.

e. Network Management (Manajemen jaringan)

Untuk menjalankan jaringan dengan baik, pengelolaan jaringan harus memiliki mekanisme untuk penyelesaian sengketa internal, alokasi sumber daya, kontrol kualitas, pemeliharaan organisasi, dan masalah administrasi lainnya.³⁰ Manajer jaringan dapat ditugaskan secara resmi atau tidak resmi. Kodim 0733 Kota Semarang sebagai bagian dari TNI AD memiliki mekanisme untuk mengatasi sengketa internal, alokasi sumber daya, control kualitas, pemeliharaan organisasi, dan masalah administrasi lainnya. Penanggung jawab kegiatan pembinaan ketahanan pangan bertugas sebagai manajer network yang ditugaskan secara resmi.

f. Access to authority (Akses terhadap kekuasaan)

Untuk mengelola jaringan maka harus ada standar yang mengikat berupa peraturan formal, sehingga dapat mengakses kekuasaan. Hal ini memungkinkan anggota jaringan untuk mengakses serangkaian prosedur pengaturan standar yang definitif dan diterima secara luas, yang berarti bahwa jaringan harus dapat menggunakan otoritas ketika diperlukan untuk mencapai tujuan mereka, dan tidak berarti bahwa jaringan harus didasarkan pada atau tunduk pada otoritas yang diberikan kepadanya.³¹ Dalam pelaksanaan kolaborasi TNI AD, Dinas Pertanian, dan kelompok tani, belum ada peraturan formal di tingkat pelaksana. Sedangkan peraturan formal ini, hanya terdapat di tingkat pusat (Mabesad dan Kementerian Pertanian). Dengan tidak adanya peraturan formal di tingkat pelaksana, dapat menyebabkan ketidakberlanjutan program ketahanan pangan.

²⁹ Deseve, *Integration and innovation. The Intelligence Community: The Role of a Netcentric Environment, Managed Networks, and Social Networks. In Unlocking the Power of Networks: Keys to High Performance Government*, Eds. S. Goldsmith and DG Kettl.

³⁰ Deseve.

³¹ Devi Arianti dan Lena Satlita, "Collaborative Governance dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul," *Natapraja* 6, no. 2 (1 Desember 2018): 195–208, <https://doi.org/10.21831/jnp.v6i2.24252>.

g. Kepemimpinan (Leadership)

Individu atau kelompok harus siap bertindak sebagai pemimpin atau pendukung jaringan untuk mendorong pekerjaan mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Seringkali, orang harus menunjukkan bahwa waktu yang dihabiskan untuk kepemimpinan jaringan adalah waktu yang berkualitas. Tujuan jaringan, organisasi, dan individu yang diberikan tugas sebagai pemimpin harus disesuaikan sehingga manfaat "kekuatan multiplier" dapat terlihat.³² Dalam membantu program Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Babinsa dan kelompok tani, ketahanan pangan nasional dan daerah, maka kegiatan pembinaan ketahanan pangan Kodim 0733 Kota Semarang dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro.

h. Distributive Accountability (Pembagian Akuntabilitas)

Dalam indikator Distributive Accountability, DeSeve menjelaskan mengenai adanya penataan atau hubungan pembagian tanggung jawab dan tugas antar setiap lembaga yang terlibat untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan.³³ Tindakan kolektif semacam ini mungkin terlihat sulit pada awalnya, tetapi dengan struktur tata kelola yang tepat, dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. TNI AD dan PPL dari Dinas Pertanian sebagai penyuluh berusaha menyadarkan Kelompok Tani akan betapa pentingnya Ketahanan Pangan.

i. Information Sharing (Berbagi Informasi)

Dalam indikator information sharing, Edward Deseve menjelaskan bahwa program kolaborasi harus menjamin adanya penyebaran informasi terkait program kolaborasi kepada pihak di luar lembaga yang terlibat. Dalam penelitian Deseve, terdapat dua pendekatan untuk berbagi informasi. Pendekatan pertama dilakukan secara langsung melalui sosialisasi dan musyawarah sedangkan pendekatan kedua melalui media sosial.³⁴ Pembagian Informasi yang dilakukan dalam kegiatan pembinaan ketahanan pangan ini, dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh seluruh anggota. Ini berarti interaksi secara langsung untuk memudahkan kelompok tani untuk memberikan langsung aspirasi dan informasi terkait program yang akan dilaksanakan. Kekurangannya, dalam kegiatan sosialisasi hanya melibatkan sedikit kelompok tani dikarenakan terbatasnya kapasitas akomodasi. Sehingga dalam penyampaian informasi tidak bisa mencakup keseluruhan kelompok tani untuk mengaksesnya.³⁵

³² Deseve, *Integration and innovation. The Intelligence Community: The Role of a Netcentric Environment, Managed Networks, and Social Networks. In Unlocking the Power of Networks: Keys to High Performance Government*, Eds. S. Goldsmith and DG Kettl.

³³ Deseve.

³⁴ Deseve.

³⁵ Hasna dan Darumurti, "Collaborative Governance dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob di Kota Pekalongan."

j. Access to Resources (Akses Terhadap Sumber Daya)

Pada indikator access to resources, DeSeve menjelaskan adanya ketersediaan sumber daya sebagai dukungan untuk melaksanakan suatu kebijakan.³⁶ Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan ketahanan pangan, Kodim 0733 Kota Semarang memiliki sumber daya manusia sejumlah 55 orang yang terdiri dari 8 orang Babinsa, 2 orang PPL, dan 45 petani yang tergabung dalam 15 Poktan dengan menggunakan anggaran TNI AD TA 2023 dan Dinas Pertanian Kota Semarang. Sarana dan prasarana kegiatan yang digunakan pembuatan kolam ikan air tawar dan media penanaman hortikultura menggunakan lahan tidur milik Kodam 0733 Kota Semarang.

KESIMPULAN

Ketahanan pangan dapat terwujud ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi atas makanan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet dan preferensi makanan mereka untuk kehidupan yang aktif dan sehat.³⁷ Sehingga ketahanan pangan dan kedaulatan pangan merupakan dua wacana yang terpisah namun saling terkait dengan pengelolaan pangan dunia teroganisir. Untuk mencapai ketahanan pangan diperlukan kolaborasi dengan berbagai aktor baik state actors dan non-state actors. Salah satu upaya untuk mencapai ketahanan pangan adalah keterlibatan aktif Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) khususnya di Kodim 0733 Kota Semarang, Jawa Tengah, melalui kegiatan pembuatan model/pilot kolam ikan air tawar dan menanam tanaman hortikultura menggunakan polybag.

Menurut Ansell dan Gash terdapat lima indikator dalam konsep Collaborative Governance, yaitu Face To Face (Dialog Tatap Muka), Trust Building (Membangun Kepercayaan), Commitment To Process (Komitmen Terhadap Proses), Share Understanding (Pemahaman Bersama), Intermediate Outcomes (Hasil Antara). Penelitian ini menunjukkan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh TNI AD khususnya Kodim 0733 Kota Semarang dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pembuatan model/demplot tanaman Hortikultura (tanaman jenis sayuran) dan model/pilot project kolam ikan air tawar. Tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan suatu wilayah sebagai lumbung logistik dalam keadaan urgensi serta guna meningkatkan penghasilan masyarakat di wilayah Kodim 0733 Kota Semarang.³⁸

Collaborative Governance merupakan suatu model yang menyatukan pemangku kepentingan umum, dan swasta dalam forum kolektif dengan pemerintahan untuk terlibat dalam

³⁶ Deseve, *Integration and innovation. The Intelligence Community: The Role of a Netcentric Environment, Managed Networks, and Social Networks. In Unlocking the Power of Networks: Keys to High Performance Government*, Eds. S. Goldsmith and DG Kettl.

³⁷ FAO, "Food Security. Policy Brief. FAO's Agriculture and Development Economics Division (ESA) with support from the FAO Netherlands Partnership Programme (FNPP) and the EC-FAO Food Security Programme," 2006.

³⁸ IV/Dip, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Ketahanan Pangan di Wilayah Kodam IV/Diponegoro Ta 2023."

pengambilan keputusan yang bersifat konsensus. Munculnya Collaborative Governance sebagai subjek dalam literatur administrasi publik dipicu oleh banyak kasus yang berhasil diuraikan oleh para ahli dan praktisi. Kolaborasi antara Kodim 0733 Kota Semarang, Kelompok tani, merupakan contoh implementasi Collaborative Governance dalam program ketahanan pangan yang sudah berjalan dengan baik, yang mendasari lima indikator yang telah diukur dan menunjukkan adanya kolaborasi yang baik antar actor. Kolaborasi dengan dinas pertanian Kota Semarang dan kelompok tani dalam ketahanan pangan ini telah mencapai sasaran baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan program ketahanan pangan Kodim 0733/Kota Semarang Tahun Anggaran 2023, diketahui hasil yang dicapai secara kualitatif yaitu meningkatnya kemampuan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam pengetahuan bidang pertanian sehingga bisa menularkan pengetahuannya kepada kelompok tani khususnya pengetahuan tentang system tanam dan teknologi dalam program ketahanan pangan. Sedangkan hasil yang dicapai secara kuantitatif yaitu telah terlaksananya kegiatan penanaman tanaman hortikultura diwilayah Kodim 0733 dan budidaya ikan lele sebanyak 1500 ekor.

Selain itu, kegiatan pembinaan Ketahanan Pangan di Kodim 0733 Kota Semarang telah memenuhi elemen keberhasilan.³⁹ Meskipun demikian, terdapat elemen yang belum dilakukan atau belum memenuhi kriteria seperti keterlibatan pihak swasta ataupun Lembaga swadaya masyarakat. Sehingga diharapkan kegiatan pembinaan ini dapat terus berlangsung dan direplikasi guna mencapai ketahanan pangan baik di daerah maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris, dan Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (1 Oktober 2008): 543–71. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Arianti, Devi, dan Lena Satlita. "Collaborative Governance dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtoharjo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul." *Natapraja* 6, no. 2 (1 Desember 2018): 195–208. <https://doi.org/10.21831/jnp.v6i2.24252>.
- Azis, Abdul, Cucu Sugiarti, dan Rachmat Ramdani. "Collaborative Governance dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian." *JURNAL MANAJEMEN* 13, no. 4 (19 Desember 2021): 647–53. <https://doi.org/10.30872/jmmn.v13i4.9948>.
- Bavelas, Janet, Jennifer Gerwing, dan Sara Healing. "Doing Mutual Understanding. Calibrating with Micro-Sequences in Face-to-Face Dialogue." *Journal of Pragmatics* 121 (November 2017): 91–112. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2017.09.006>.
- Bila, Aziza, dan Boni Saputra. "Collaborative Governance dalam Pemerintahan" 09 (2019).

³⁹ Deseve, *Integration and innovation. The Intelligence Community: The Role of a Netcentric Environment, Managed Networks, and Social Networks. In Unlocking the Power of Networks: Keys to High Performance Government, Eds. S. Goldsmith and DG Kettl.*

- Coleman, William D., Grace D. Skogstad, dan Michael M. Atkinson. "Paradigm Shifts and Policy Networks: Cumulative Change in Agriculture." *Journal of Public Policy* 16, no. 3 (1996): 273–301.
- Deseve, G. E. *Integration and innovation. The Intelligence Community: The Role of a Netcentric Environment, Managed Networks, and Social Networks. In Unlocking the Power of Networks: Keys to High Performance Government, Eds. S. Goldsmith and DG Kettl, 2009.*
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh. "An Integrative Framework for Collaborative Governance." *Journal of Public Administration Research and Theory* 22, no. 1 (1 Januari 2012): 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.
- FAO. "Food Security. Policy Brief. FAO's Agriculture and Development Economics Division (ESA) with support from the FAO Netherlands Partnership Programme (FNPP) and the EC-FAO Food Security Programme," 2006.
- Hasna, Alyaa Larasati, dan Awang Darumurti. "Collaborative Governance dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob di Kota Pekalongan." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 7, no. 1 (28 April 2023): 25–37. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.24210>.
- IV/Dip, K. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Ketahanan Pangan di Wilayah Kodam IV/Diponegoro Ta 2023," 2023.
- . "Pangdam IV/Diponegoro Gandeng Forkopimda Jateng Dukung Ketahanan Pangan Nasional," 2022. <https://kodam4.mil.id/pangdam-iv-diponegoro-gandeng-forkopimda-jateng-dukung-ketahanan-pangan-nasional/>.
- Iyoeaga, Rofi' Ramadhona, Endang Wirjatmi Trilestari, dan Cintantya Andhita Dara Kirana. "Collaborative Governance Dalam Pembangunan Sektor Pertanian Di Kabupaten Bandung." *PERSPEKTIF* 9, no. 1 (1 Januari 2020): 55–65. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2864>.
- Jolejole, Christina B., Scott M. Swinton, G. Philip Robertson, dan Sara P. Syswerda. "Profitability and Environmental Stewardship for Row Crop Production: Are There Trade-Offs?" *2009 Conference, August 16-22, 2009, Beijing, China, 2009 Conference, August 16-22, 2009, Beijing, China, 2009.* <https://ideas.repec.org/p/ags/iaae09/50920.html>.
- Larsson, Oscar L., dan Sara Sjöqvist. "Managing National Food Security in the Global North: Is Collaborative Governance a Possible Route Forward?" *Risk, Hazards & Crisis in Public Policy* 13, no. 2 (Juni 2022): 118–43. <https://doi.org/10.1002/rhc3.12231>.
- Lele, U., M. Klousia-Marquis, dan S. Goswami. "Good Governance for Food, Water and Energy Security." *Aquatic Procedia* 1 (2013): 44–63. <https://doi.org/10.1016/j.aqpro.2013.07.005>.
- Mafaza, Ardhia, dan Kristina Setyowati. "Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata." *Jurnal Kebijakan Publik* 11, no. 1 (16 April 2020): 7. <https://doi.org/10.31258/jkp.11.1.p.7-12>.
- Mujiburrohman, M. A. "Civil Society-Militer dalam Mencapai Ketahanan Pangan di Jawa Timur Civil Society-Military In Achieve Food Security In East Java" 12, no. 2 (2021).
- Nassaji, Hossein. "Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis." *Language Teaching Research* 19, no. 2 (Maret 2015): 129–32. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>.
- Permatasari, Arini. "Collaborative Governance BUMD Desa Margaasih Kabupaten Bandung." *REFORMASI* 13, no. 1 (7 Februari 2023): 25–33. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4370>.

Dwi Indriastuti, Mia Priluddina, Ryan Budi Rusmana, Toni Yuliyanto: Tata Kelola Kolaboratif Program Ketahanan Pangan di Kodim 0733 Kota Semarang

Ramadhan, Gilang. "Fintech Dan Collaborative Governance Dalam Pertanian Di Banten." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 17, no. 1 (26 Juni 2020): 145–60. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.567>.

Ran, Bing, dan Huiting Qi. "The Entangled Twins: Power and Trust in Collaborative Governance." *Administration & Society* 51, no. 4 (1 April 2019): 607–36. <https://doi.org/10.1177/0095399718801000>.

Sulaeman, Nanang, Ipik Permana, dan Moh Taufik Hidayat. "Collaborative Governance Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kota Cirebon." *Ijd-Demos* 4, no. 1 (7 April 2022). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.204>.

Tri Sambodo, Giat, dan Ulung Pribadi. "Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta." *Journal of Governance and Public Policy* 3, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0052>.